

PERJUMPAAN ANTARA GERAKAN MORAL DAN MANUEVER POLITIK PADA DEKLARASI KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA

Abdul Rahman

Universitas Negeri Makassar/Fakultas Ilmu Sosial/Program Studi Pend. Antropologi
Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Indonesia
e-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id

diterima 15 Agustus 2022

revisi 01 September 2022

diterbitkan 14 September 2022

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia serta reaksi yang muncul dari kubu pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka maupun pemberitaan dari harian online. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melakukan perbandingan antara sumber informasi yang satu dengan sumber informasi yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan oleh iklim reformasi, termasuk pemerintahan Joko Widodo memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk berserikat dan berpendapat di muka umum. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian warga negara Indonesia yang ditandai dengan deklarasi KAMI yang mengklaim diri sebagai sebuah gerakan moral untuk meyelamatkan Indonesia. Namun pada sisi lain pihak pendukung pemerintah menilai bahwa KAMI penuh dengan muatan politis yang berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Joko Widodo.

Keywords: Demokrasi, KAMI, Gerakan Moral, Manuever Politik

Abstract

This article aims to find out the background of the Declaration of the Action to Save Indonesia and the reactions that emerged from the government and the community. This study uses qualitative research methods by utilizing library sources and news from online newspapers. The collected data is then analyzed by making comparisons between one information source and another. The results of the study show that the government generated by the reform climate, including the Joko Widodo administration, provides an opportunity for every citizen to associate and express opinions in public. This opportunity was used by some Indonesian citizens which was marked by the KAMI declaration which claimed to be a moral movement to save Indonesia. However, on the other hand, the supporters of the government consider that KAMI is full of political content that seeks to delegitimize the government of Joko Widodo.

Keywords: Democracy, KAMI, Moral Movement, Political Maneuvering

I. PENDAHULUAN

Pandangan umum menganggap bahwa kelahiran secara mendadak sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia, pada tahun 1998-1999 bukanlah hasil pembangunan, namun malahan krisis modernisasi sosial ekonomi yang berbasis pada pasar kapitalis (Giyanto, 2020). Demikian pula kelompok borjuis dan kelas menengah yang sedang tumbuh pun tidak

memberikan banyak perlawanan terhadap negara dan otoritarianisme melalui hak asasi manusia dan demokrasi. Pengecualiannya hanya sejumlah kecil kelompok intelektual yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, ahli hukum, pekerja sosial dan budaya serta para jurnalis. Dan selain sejumlah amat kecil dukungan luar negeri, baru setelah kejatuhan Soeharto, negara-negara Barat mulai memberikan perhatian dan dukungan terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Sejak tumbanganya Orde Baru, kebangsaan atau nasionalisme sebagai preferensi, meski kadang muncul di ranah masyarakat warga, praktis ditinggalkan oleh pemerintah (Berenschot & van Klinken, 2019). Pada zaman Orde Baru, yang ditopang oleh kekuatan penuh militer dan golongan karya, berhasil melakukan penetrasi ke berbagai sektor kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Pemerintahan Soeharto menempatkan bangsa dan Pancasila sebagai tema indoktrinasi politik yang sentral. Ditinggalkannya nasionalisme sebagai preferensi merupakan bagian dari logika perubahan politik akibat krisis ekonomi yang parah di akhir Orde Baru. Dalam euforia politis waktu itu, gerakan reformasi berkeyakinan bahwa Indonesia baru yang demokratis harus merupakan *break* dari Indonesia Soeharto, maka doktrin-doktrin politik Orde Baru, termasuk nasionalisme tidak lagi menjadi preferensi politik (Hardiman, 2013).

Pada awal reformasi, kekuatan-kekuatan politik yang ada termasuk berbagai gerakan mahasiswa, belum memiliki bayangan yang terang mengenai masa depan Indonesia. Mereka belum memiliki agenda demokrasi. Setelah Soeharto *lengser keprabon* pada 21 Mei 1998, Indonesia berada pada posisi ibarat kapal karam yang kehilangan nahkondanya (Afiyah, 2021). Indonesia dilanda kerusuhan dan konflik horizontal misalnya konflik bernuansa agama di Ambon, gerakan separatis di Aceh, lepasnya Timor Timur dari Indonesia, dan bangkitnya radikalisme Islam. Dalam kekaburan bayangan terang mengenai Indonesia Baru, gerakan reformasi sudah sejak awal dihadapkan pada tiga preferensi yang terkait dengan kekuatan-kekuatan politis yang ada, yakni pasar, Islam dan masyarakat sipil (Wijaya, 2014).

Kini reformasi telah berusia lebih dari dua dekade. Perjalanan demokrasi dalam hal kematangan dan kualitas masih dalam perdebatan baik di lingkaran akademik maupun di ruang publik. Harus diakui bahwa derap langkah demokrasi yang telah berjalan sekitar 20 tahun lebih masih berjalan pelan. Meski demikian, apa yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia sudah sepatutnya menjadi tonggak dalam mengidentifikasi dan

menyempurnakan celah-celah kelemahan demokrasi. Sejak lepas dari pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah mengalami lima kali penyegaran kepemimpinan nasional. Dua presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo merupakan hasil pemilihan langsung dari rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Tentu, dalam proses pemilihan itu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa politik yang cukup dinamis.

Politik yang dinamis dapat dijumpai pada pemilihan umum tahun 2019. Harus diakui bahwa hingga saat ini, jejak-jejak dan ingatan yang terkait dengan pemilu 2019 masih dijumpai dalam wacana maupun perdebatan-perdebatan yang ada di ruang fisik, ruang publik, dan media sosial (Fauzi, 2019). Masih ada penilaian bahwa pihak yang kalah pada pemilu 2019 masih belum mampu untuk *move on*. Atas nama demokrasi, setiap orang memiliki kebebasan yang seolah tiada batas. Sesama anak bangsa saling menegasikan dengan munculnya istilah cebong dan kadrun (Fensi, 2019). Demokrasi menjelma menjadi industri, medan paling sempurna bagi segala bentuk tawar menawar yang sifatnya banal. Sebagaimana lazimnya dunia industri, demokrasi menjelma semacam arena pertukaran, siapa mendapatkan apa (Aspinall, 2019). Modus pertukaran semacam inilah yang menjadi stimulus nafsu para pialang dan petualang politik untuk meraih keuntungan dari segala hiruk pikuk dan riuh rendah politik keseharian.

Kesemarakan demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo diwarnai pula dengan narasi yang diciptakan oleh sekelompok orang-orang yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Kosa kata yang lazim muncul di antaranya penistaan terhadap agama, kriminalisasi ulama, bangkitnya oligarkhi, korupsi yang merajalela, serta kebangkitan PKI. Semua isu tersebut ditujukan kepada pemerintah saat ini. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah salah satunya dibuktikan dengan munculnya kekuatan masyarakat sipil yang membingkai diri dalam sebuah wadah organisasi yang dikenal dengan nama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kehadiran KAMI sempat menjadi perhatian

publik dan bahkan diperkirakan akan menjadi kekuatan besar dalam mengawal jalannya pemerintahan. KAMI telah mewarnai konstelasi perpolitikan nasional di tengah gencarnya laju demokrasi, sehingga menjadi menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai organisasi ini.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data bersifat penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber informasi (Zed, 2008) yang terdapat pada jurnal maupun berita online. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisis dengan melakukan perbandingan terhadap karya-karya para peneliti terdahulu. Setiap informasi yang didapatkan dilakukan perbandingan dengan informasi yang lain untuk memperoleh keabsahan data. Data yang dianggap absah kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat dinikmati oleh khalayak umum demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial humaniora.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KAMI Sebagai Gerakan Moral: Sebuah Klaim

Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk melaksanakan perubahan terhadap segala yang pernah terjadi pada masa lampau. Mengembalikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin, dan memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (ARIF, n.d.). Dinamika sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan realitas demokrasi yang mengalami pasang surut. Dinamika demokrasi dibarengi pula dengan upaya Bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kualitas tatanan politik di tengah masyarakat multikultural.

Kelahiran reformasi yang ditandai dengan berakhirnya masa kekuasaan Soeharto dan dimulainya tatanan demokrasi

yang dipelopori oleh Habibie melalui kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat (Masykuri & Ramadhan, 2021). Kebebasan tersebut menjadi kunci utama munculnya *check and balances* serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak melenceng dari garis demarkasi demokrasi Pancasila. Dalam perkembangannya demokrasi terus dirawat dan dipraktekkan oleh setiap era pemerintahan Indonesia hingga pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Perjalanan demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo dinilai mengalami penurunan kualitas. Laporan indeks demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi dari skor 6,48 pada tahun 2019 menjadi 6,30 pada tahun 2020. Hasil tersebut menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 167 negara di dunia. Dalam konteks wilayah Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada pada urutan keempat setelah Malaysia, Timor Leste, dan Philipina.

Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain menguatnya peran Tiongkok di berbagai belahan dunia akibat kebijakan mengutamakan ekonomi daripada demokrasi, munculnya gejala kekerasan atas nama agama, konflik dan diskriminasi politik bernuansa SARA, maraknya fenomena perpanjangan masa jabatan pemerintahan maupun praktik demokrasi yang tidak dibarengi dengan konsensus kekuasaan, serta munculnya benturan kepentingan antara politik dan bisnis. Kemunduran demokrasi ditandai pula dengan maraknya gejala deinstitutionalisasi politik yang tidak beriringan dengan usaha pengembangan demokrasi Pancasila. Fenomena bermunculannya buzzer, hingga aktivitas pejabat publik di media sosial yang tidak dapat membedakan antara ranah privat dengan ranah publik/jabatan, sehingga melahirkan komunikasi publik yang tidak mendukung proses pelebagaan sistem demokrasi yang berintegritas dan berkualitas.

Demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat selalu diperdebatkan. Survei

Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa sebanyak 64,9 persen responden takut menyuarakan pendapatnya. Ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan pertanda buruk bagi pemerintahan Joko Widodo. Ketakutan tersebut disebabkan oleh adanya upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang disengaja oleh pemerintah melalui kebijakan, perlakuan, hingga pembiaran dan pengabaian yang dilakukan oleh penguasa.

Kondisi demokrasi yang dinilai memburuk pada masa pemerintahan Joko Widodo menjadi pemicu munculnya gerakan masyarakat sipil yang berupaya untuk menegakkan demokrasi. Kemunculan gerakan masyarakat sipil dinilai sebagai bentuk pengawalan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah karena minimnya harapan terhadap parlemen. Anggota parlemen tidak akan mampu berbuat maksimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan, karena pemerintahan Joko Widodo dibangun berdasarkan koalisi gemuk. Masyarakat tidak bisa lagi berharap banyak kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Harapan terhadap masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan tidak lepas dari adanya pengalaman pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan SBY yang ditopang pula oleh kekuatan koalisi gemuk, gerakan masyarakat sipil cukup signifikan dalam mengawal kinerja pemerintah (Adiwilaga, 2018).

Salah satu gerakan masyarakat sipil yang memiliki keinginan untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo ialah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, Jakarta. Tokoh utama dari KAMI ialah Dien Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo. Para deklarator dan simpatisan KAMI mengklaim diri sebagai kekuatan atau gerakan moral yang tidak memiliki tendensi politik terhadap pemerintah. Secara teoritik, gerakan moral merupakan pengejawantahan dari sikap bijak yang mempunyai nilai kemanfaatan agar bisa menjadi teladan dan contoh yang baik sehingga tingkah lakunya dapat ditiru oleh orang lain. Gerakan moral mengandung sebuah kekuatan moral yang

serirama dengan tumbuhnya nilai-nilai moral dalam masyarakat, sehingga muncul identitas sosial yang diperkuat oleh ikatan nilai-nilai solidaritas kebangsaan dan kerakyatan yang bermuara pada pembangunan manusia yang berkeadaban.

Klaim bahwa KAMI merupakan hanya pada sebatas gerakan moral terlihat pada pernyataan Dien Syamsuddin bahwa KAMI hadir dan akan bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan kebenaran yang diyakini berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, dan kemaslahatan bersama. KAMI memiliki keinginan untuk menjadi pengawal pergerakan pemerintah agar tetap konsisten dan tegak lurus dalam menjalankan aktivitas pemerintahan berdasarkan amanah konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai sebuah gerakan moral maka KAMI menyampaikan beberapa hal dalam deklarasi pertamanya di Tugu Proklamasi, yaitu:

- a. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- b. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
- c. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada

- membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
- d. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjahar kekayaan negara.
 - e. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.
 - f. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
 - g. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
 - h. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan

kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

3.2. KAMI Sebagai Manuver Politik:

Sebuah penilaian

Dalam mengamati konstelasi politik nasional Indonesia, adalah hal yang sangat sulit ditebak ke mana arahnya. Kondisi demikian tampaknya mengingatkan kita pada seorang sosiolog, Erving Goffman yang memperkenalkan teori dramaturgi. Dalam pandangan Goffman, politik demokrasi memiliki kemiripan dengan panggung sandiwara, di mana masyarakat dipertontonkan dengan beraneka ragam tingkah laku para elite politik. Pada panggung yang tampak, mereka berteriak memperjuangkan kesejahteraan rakyat, namun di baliknya mereka juga melakukan tindakan menggarong uang rakyat (Rolando & Walidah, 2021).

Dramaturgi tampaknya juga berlaku pada KAMI. Para elitnya berusaha meyakinkan khalayak umum bahwa perkumpulan mereka hanya semata-mata sebagai sebuah gerakan moral yang bertujuan mulia untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki keadaan Indonesia yang jauh melenceng dari cita-cita Pancasila sejak di bawah pemerintahan Joko Widodo (Belinda & Puspitasari, 2021). Akan tetapi klaim mereka tidak serta merta dapat dipercaya oleh sebagian kalangan di negara ini, terutama mereka yang berada pada barisan pemerintahan. Wanto Sugito, salah satu politisi PDI-P menilai bahwa deklarasi KAMI penuh dengan manuver politik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran Amien Rais, Rocky Gerung, dan Rizal Ramli dalam acara deklarasi. Publik tahu secara luas bahwa ketiga sosok tersebut selama ini memang paling getol menyerang berbagai kebijakan pemerintah, seolah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan kehendak rakyat. Kecurigaan akan adanya manuver politik dalam deklarasi itu semakin kuat, ketika Novel Bamukmi selaku peserta deklarasi melontarkan gagasan agar MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang dinilai tidak mampu menyelesaikan

berbagai krisis yang menimpa rakyat (Putra, 2022).

Penilaian yang sama muncul pula dari politisi Partai Nasdem. Willy Aditya menilai bahwa tuntutan yang disampaikan oleh KAMI memang sudah menjadi perhatian pemerintah saat ini. Jadi ada kesalahpahaman ketika pemerintah dianggap tidak berbuat apa-apa dalam menghadapi berbagai kesulitan di tengah pandemi covid-19. Jadi, bagi Willy hal yang disampaikan oleh KAMI, meskipun itu bermuatan politis, tapi dalam iklim demokrasi itu hal yang lumrah. Pemerintah memang tidak bisa berbuat sendiri tanpa bantuan pihak lain dalam mengatasi krisis dan memajukan Indonesia.

Penilaian terhadap KAMI bukan hanya datang dari para politisi yang satu gerbong dengan pemerintah, tetapi datang pula dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum (SUTRA, 2021). I Kadek Andre Nuaba selaku Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menilai bahwa deklarasi KAMI jika benar bernuansa gerakan moral, tentu akan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya tidak berkerumun mengumpulkan massa di tengah mewabahnya Covid-19. Negara memang memberikan jaminan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, tetapi ketika gerakan itu berupaya mendelegitimasi pemerintah, itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Demikian halnya yang disampaikan oleh Mohammad Daud selaku juru bicara Koalisi Aksi Milenial Indonesia. Menurut dia, KAMI telah mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan dan membohongi rakyat. Sesungguhnya KAMI adalah sebuah gerakan politik yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak dapat bersabar terhadap pergantian pemerintahan secara konstitusional.

IV. KESIMPULAN

Dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, adalah merupakan hal yang lazim ketika masyarakat sipil terlibat

dalam mengawasi jalannya pemerintahan. KAMI sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mengklaim diri sebagai gerakan moral tentu tidak dapat dihalangi. Deklarasi KAMI yang di dalamnya memuat delapan tuntutan terhadap pemerintah tentu harus menjadi perhatian dan diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan negara. Akan tetapi pada sisi lain, setiap aksi pasti memunculkan reaksi yang beragam. Pihak-pihak yang berada dalam gerbong koalisi pemerintah justru menilai deklarasi KAMI sesungguhnya merupakan gerakan politik yang berupaya mendelegitimasi pemerintah dengan cara membangun opini publik bahwa pemerintah telah gagal dalam melaksanakan cita-cita Pancasila. Bagi pendukung pemerintah, deklarasi KAMI adalah semacam ketidaksabaran bagi kelompok-kelompok yang hendak berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R. (2018). Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 14–32.
- Afiyah, M. S. (2021). REFORMASI EKONOMI HABIBIE 1998-1999: SEBUAH KEBIJAKAN ATASI KRISIS EKONOMI ORDE BARU. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 249–262.
- ARIF, Y. D. A. N. A. Y. D. A. N. (n.d.). KONTRIBUSI BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM DEMOKRATISASI (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 99–108.
- Aspinall, E. (2019). Jokowi, Masalah Ketidakmerataan dan Demokrasi di Indonesia. *SIASAT*, 4(2), 9–14.
- Belinda, F., & Puspitasari, M. (2021). Hoaks and Resistance to Government Motion Case Study KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia). *Journal of Sosial Science*, 2(2), 139–143.

- Berenschot, W., & van Klinken, G. (2019). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40–48.
- Fensi, F. (2019). Paradoxical Language of Cebong-Kampret in Facebook as a Mirror of The Political Language of Indonesia. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(2), 103–120.
- Giyanto, A. (2020). *Kelas Menengah Progresif*. Pandiva Buku.
- Hardiman, F. B. (2013). *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Kanisius.
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 68–87.
- Putra, V. P. (2022). Construction of News on the Shooting of Six FPI Soldiers at Tempo. co. *PROPAGANDA*, 2(1), 39–50.
- Rolando, D. M., & Walidah, A. (2021). Komunikasi Budaya Dalam Teater Dulmuluk Perspektif Dramaturgi Erving Goffman. *KOMUNIKA*, 4(1), 33–48.
- SUTRA, T. I. A. (2021). *SIKAP POLITIK MAHASISWA FISIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP DEKLARASI KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Dalam Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(1), 137–158.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.